

Menteri Yohana: Perlu Usaha Bersama Putus Mata Rantai Perkawinan Anak

Sunday, 21 Oktober 2018 WIB, Oleh: Ika



Pernikahan anak masih marak terjadi di Indonesia dan kondisinya semakin mengkhawatirkan.


Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 mencatat sekitar 1,1 persen anak menikah pertama kali sebelum usia 15 tahun. Sementara itu, sekitar 22,4 persen perempuan usia 20-24 tahun yang pernah menikah pertama kali pada usia di bawah 18 tahun.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof. Yohana Susana Yembise, menegaskan pemerintah berusaha terus mendorong untuk menurunkan angka pernikahan anak. Sebab, pernikahan tidak hanya menghilangkan hak anak untuk menikmati masa remajanya tetapi juga memiliki banyak risiko yang mengancam di dalamnya.

"Efek dari pernikahan anak begitu banyak mulai dari putus sekolah, kemiskinan, rentan kekerasan dalam rumah tangga, hingga risiko kematian ibu dan anak saat melahirkan di usia terlalu muda," kata Yohana dalam paparannya sebagai keynote speaker yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kementerian PPPA, Sri Prihantini Lestari, Sabtu (20/10) di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM.

Dalam Seminar Nasional Perempuan dan Budaya ini Yohana mengatakan banyaknya kasus pernikahan anak di tanah air disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah budaya. Budaya perjodohan kerap dilakukan oleh orang tua yang mengakibatkan terjadinya perkawinan di usia dini

"Hal ini menjadi kontradiktif dengan UU Perlindungan Anak yang melarang perkawinan anak di bawah usia 18 tahun," tuturnya.



Maraknya pernikahan anak ini dapat dicegah dengan usaha bersama serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sebagainya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menolak pernikahan usia dini pada anak.

“Memutus mata rantai pernikahan anak ini menjadi usaha bersama seluruh komponen bangsa,” jelasnya.

Dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) UGM ini turut menghadirkan pembicara Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dr. Budi Wahyuni, dan Kepala BMKG, Prof. Dwikorita Karnawati. Diikuti lebih sekitar 200 peserta meliputi mahasiswa dan akademisi dari berbagai wilayah Indonesia. (Humas UGM/Ika)

Berita Terkait

- [Menteri PPPA Deklarasi Daerah Ramah Perempuan dan Anak di Bantul](#)
- [Pemberian Psikoedukasi Perkawinan Mampu Tingkatkan Pengetahuan Calon Pengantin](#)
- [Kemiskinan Picu Perkawinan Dini](#)
- [Menteri PPPA Meresmikan Woman in River Edupark di Kampung Code](#)
- [Pengamat UGM: Melanggar Hak Anak, Batas Usia Perkawinan Harus Dinaikkan](#)